

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat kesenjangan diberbagai daerah.

Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang dikategorikan sebagai Negara yang sedang berkembang. Tujuan dari pembangunan ekonomi pada suatu Negara yang sedang berkembang merupakan peningkatan standar hidup dari penduduk pada Negara yang bersangkutan yang diukur dengan peningkatan pendapatan perkapita.

Sumber daya—sumber daya yang dimiliki Indonesia merupakan asset penting untuk mendukung pertumbuhan perekonomian agar tetap terus bertahan dan berkembang. Namun tidak berarti Negara yang sedang berkembang dan memiliki sumber daya yang berlimpah tidak memiliki masalah dalam pembangunan perekonomiannya. Indonesia adalah Negara yang memiliki masalah dalam pembangunan ekonominya. Factor-faktor yang menjadi permasalahan bangsa Indonesia salah satunya adalah tentang pertumbuhan ekonomi.

Menurut Lincolin (1999) pengertian dari pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Selain itu Hirschman (1958) juga mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu Negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (trickling down effects). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengkutupan (polarization effect).

Maka dari itu demi tercapainya tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disini peran dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan perekonomian. Tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah : (1) menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, (2) mencapai stabilitas perekonomian daerah, (3) membangun basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beraneka ragam. Pemerintah daerah sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan.

Walaupun Indonesia memiliki beragam sumber daya yang berlimpah tetapi tidak menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat, hal ini bisa dikarenakan oleh berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, daya tarik wisata, Tenaga Kerjadan juga penetapan upah minimum, karena jika semakin baik perekonomian daerah maka suatu daerah akan semakin sejahtera.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah
Tahun 2010-2014

PROVINSI JAWA TENGAH	2010	2011	2012	2013	2014
Kabupaten Cilacap	4.07	1.98	2.09	2.96	2.93
Kabupaten Banyumas	6.61	5.88	6.89	4.78	5.67
Kabupaten Purbalingga	5.67	5.79	5.61	5.73	5.86
Kabupaten Banjarnegara	5.44	5.23	5.26	5.07	5.27
Kabupaten Kebumen	6.15	4.88	4.65	5.80	5.80
Kabupaten Purworejo	5.64	4.59	5.11	4.63	4.49
Kabupaten Wonosobo	5.37	4.70	5.25	4.16	4.89
Kabupaten Magelang	6.68	4.88	6.30	4.87	4.88
Kabupaten Boyolali	6.34	5.33	5.83	5.04	5.42
Kabupaten Klaten	6.29	5.71	6.27	5.38	5.79
Kabupaten Sukoharjo	5.88	5.90	5.78	5.26	5.40
Kabupaten Wonogiri	3.58	5.94	4.79	5.26	5.30
Kabupaten Karanganyar	4.95	5.72	5.69	5.12	5.22
Kabupaten Sragen	6.55	6.12	6.71	5.59	5.58
Kabupaten Grobogan	3.19	5.08	4.55	4.03	4.07
Kabupaten Blora	4.42	4.90	5.36	4.39	4.39
Kabupaten Rembang	5.19	5.32	5.41	5.15	5.14
Kabupaten Pati	5.91	5.93	5.90	4.54	4.63
Kabupaten Kudus	4.24	4.11	4.53	4.26	4.47
Kabupaten Jepara	4.92	5.86	5.25	4.64	4.80
Kabupaten Demak	5.39	4.46	5.27	4.27	4.29
Kabupaten Semarang	6.27	6.03	6.87	6	5.84
Kabupaten Temanggung	6.09	4.27	6.14	5.15	5.06
Kabupaten Kendal	6.57	5.21	5.93	5.10	5.17
Kabupaten Batang	6.12	4.62	5.84	5.31	5.43
Kabupaten Pekalongan	5.66	4.81	5.99	4.92	4.95
Kabupaten Pemasang	5.01	5.32	5.53	5.52	5.53
Kabupaten Tegal	6.39	5.23	6.75	5	5.03
Kabupaten Brebes	6.65	4.58	5.97	5.32	5.30
Kota Magelang	6.11	5.37	6.04	4.88	4.90
Kota Surakarta	6.42	5.58	6.17	5.24	5.28
Kota Salatiga	6.58	5.53	6.27	4.80	5.54
Kota Semarang	6.58	5.97	6.64	5.30	6.38
Kota Pekalongan	5.49	5.61	5.91	5.48	5.48
Kota Tegal	6.47	4.21	5.45	5.03	5.03

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada Kabupaten Grobogan dengan jumlah 3,19%, sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Magelang dengan prosentase 6,68%. Untuk tahun 2011 Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dimiliki oleh Kabupaten Cilacap dengan presentase 1,98%, sedangkan untuk presentasi laju pertumbuha ekonomi tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Sragen. Ditahun 2012 Kabupaten yang mengalami presentase terendah dalam pertumbuhan ekonomi dialami oleh Kabupaten Cilacap dengan presentase sebesar 2,09% dan untuk kenaikan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh oleh Kabupaten Banyumas dengan 6,89%. Pada tahun 2013 presentase terendah dimiliki oleh Kabupaten Cilacap dengan 2,96% dan pada perolehan presentase tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Semarang dengan presentase sebesar 6%. Yang terakhir perolehan laju pertumbuhan ekonomi terendah dimiliki oleh Kabupaten Cilacap dengan presentase sebesar 2,93% dan perolehan presentase tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang dengan perolehan sebbesar 6,38%.

Dari data tersebut terlihat bahwa setiap tahunnya laju pertumbuhan ekonomi selalu mengalami perubahan. Walaupun perolehan presentase terendah paling banyak dimiliki oleh Kabupaten Cilacap tapi di Kabupaten Cilacap tersebut juga dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonominya selalu mengalami kenaikan sedikit demi sedikit, berarti walau presentase kenaikan pertumbuhan ekonomi di Cilacap rendah tetapi dapat dikatakan bahwa pemerintah berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi tertinggi setiap tahunnya diperoleh oleh Kabupaten/Kota yang berbeda-beda, dengan kata lain daerah-daerah tersebut selalu berkembang dan tumbuh perekonomiannya.

Tabel 1.2
Jumlah penduduk Jawa Tengah
Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah penduduk
2010	32.443.886
2011	32.725.378
2012	32.998.692
2013	33.264.339
2014	33.522.663

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dari Tabel 1.2 tentang Jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2010-2014 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 saja jumlah penduduk Jawa Tengah sudah mencapai 32.443.886 juta. Untuk tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 32.725.378 juta. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Jawa Tengah sendiri sebesar 32.998.692 juta. Di tahun 2013 jumlah penduduk Jawa Tengah sebesar menjadi 33.264.339 juta. Sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 33.522.663 juta. Dari sini dapat kita lihat bahwa pertumbuhan penduduk Jawa Tengah selalu meningkat setiap tahunnya, dan ini memberikan pengaruh positif bahkan negatif untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan.

Tabel 1.3
Rata-rata IPM di Jawa Tengah
Tahun 2010-2014

Tahun	IPM
2010	72,49
2011	72,94
2012	73,36
2013	74,05
2014	68,78

Sumber : BPS Jawa Tengah

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibutuhkan faktor lain yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disini dibutuhkan faktor lain seperti IPM. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Morris D mengenalkan Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Kalitas Hidup (IKH). IKH merupakan indeks gabungan dari 3 indikator yaitu: tingkat harapan hidup, angka kematian dan tingkat melek huruf. Sejak tahun 1990 United Nations for Development Program (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index=HDI). Indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah: tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf masyarakat, tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing-masing negara. Dalam *Indonesian Human Development Report* (2013), dijelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke 121 dari 187 negara pada tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia harus memperhatikan segi kualitas masyarakatnya, karena masyarakat merupakan subyek utama pembangunan.

Dari tabel 1.3 tentang rata-rata IPM di Jawa Tengah pada tahun 2010-2014 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 IPM di Jawa Tengah sebesar 72,49 persen. Untuk tahun 2011 mengalami sedikit peningkatan sehingga menjadi 72,94 persen. Di tahun 2012 IPM di Jawa Tengah sebesar

73,36 persen. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 74,05 persen. Dan untuk tahun 2014 malah menurun menjadi 68,78 persen. Dapat disimpulkan jika IPM Jawa Tengah pada tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan, tetapi menurun pada tahun 2014.

Begitu pentingnya IPM untuk membantu proses peningkatan pertumbuhan ekonomi, sebagai pembentuk masyarakat yang lebih baik dalam segi kesehatan dan pendidikan sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Dengan IPM yang tinggi maka akan meningkatkan kualitas masyarakat sehingga semakin baik pula masyarakat yang terbentuk, dengan begitu diharapkan akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran sehingga menjadi masyarakat yang produktif untuk bekerja.

Dengan terbentuknya masyarakat yang memiliki IPM tinggi maka diharapkan akan menciptakan inovasi-inovasi untuk membentuk perekonomian yang lebih baik. Disini banyak sekali sektor lain selain pertanian yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini walau tidak memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi tetapi dapat membantu meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat sekitar tempat wisata dengan cara adanya lapangan kerja baru.

Tabel 1.4
Jumlah Daya Tarik Wisata di Jawa Tengah
Tahun 2010-2014

Tahun	Daya tarik wisata
2010	266
2011	284
2012	385
2013	417
2014	467

Sumber : BPS Jawa Tengah

Sektor pariwisata juga dapat meningkatkan pemasukan negara dengan cara kunjungan para wisatawan asing sehingga dapat meningkatkan pendapatan devisa pariwisata dan otomatis pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Selain sebagai sumber pendapatan devisa, pariwisata juga memberikan kontribusi untuk penciptaan lapangan kerja baru, kegiatan dalam area wisata membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu sektor pariwisata di Jawa Tengah harus terus dikembangkan agar pariwisata di Jawa Tengah dapat lebih maju.

Pada Tabel 1.4 tentang Jumlah Daya Tarik Wisata di Jawa Tengah pada tahun 2010-2014 memberikan hasil bahwa pada tahun 2010 sebanyak 266 daya tarik wisata dan event yang ada untuk menarik para wisatawan. Di tahun 2011 jumlah daya tarik wisata dan event naik menjadi 284. Tahun 2012 daya tarik wisata dan event yang dilakukan naik 100% menjadi 385. Untuk tahun 2013 menjadi 417. Sedangkan tahun 2014 jumlah daya tarik wisata dan event menjadi 467. Walaupun setiap tahunnya daya tarik wisata dan event yang diadakan selalu meningkat tetapi disini peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan pariwisata juga sangat dibutuhkan, hal ini untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung ke tempat pariwisata yang ada di Jawa Tengah.

Tabel 1.5
Jumlah Angkatan Kerja di Jawa Tengah
Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja
2010	16.856.330
2011	17.026.107
2012	17.513.488
2013	17.524.022
2014	17.547.026

Sumber : BPS Jawa Tengah

Di Jawa Tengah sendiri memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, sehingga juga menghasilkan Tenaga Kerjayang banyak pula. Tetapi banyaknya jumlah penduduk belum tentu merupakan semua tenaga kerja, ada juga yang lansia dan anak-anak. Dari data Tabel 1.5 Jumlah Angkatan Kerja di Jawa Tengah Tahun 2010-2014 menghasilkan data bahwa pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah sebesar 16.856.330 juta. Pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja naik menjadi 17.026.10 juta. Di tahun 2012 pun jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah naik menjadi 17.513.488 juta. Untuk tahun 2013 jumlah angkatan kerja hanya mengalami sedikit peningkatan menjadi 17.524.022 juta. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah menjadi 17.547.026 juta. Peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya di Jawa Tengah diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk sebagai penyedia Tenaga Kerja, tenaga ahli, yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Disamping pertambahan jumlah penduduk, mengakibatkan bertambah dan semakin kompleks kebutuhannya (Sukirno, 1985). Pertambahan penduduk dan hal hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1997).

Masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Seiring dengan berubahnya lingkungan ekonomi di negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan Tenaga Kerja, yang selanjutnya semakin dicituk oleh

faktor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada gilirannya telah mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya, penyediaan lapangan kerja.

Perkembangan keadaan ketenagakerjaan di dapat dilihat dari seberapa banyak pengangguran di daerah tersebut, diharapkan ketenagakerjaan di Jawa Tengah akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, walaupun di beberapa daerah masih terdapat jumlah pengangguran yang tinggi, yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan lapangan kerja. Lapangan kerja yang menyerap Tenaga Kerjapaling banyak berada disektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan Indonesia yang masih menjadi negara berkembang, karena sektor pertanian merupakan sektor pemberi kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang merupakan negara maju sektor pertanian bukan merupakan sektor pemberi kontribusi tertinggi, sedangkan yang memberikan kontribusi tertinggi adalah sektor industri, karena sektor pertanian merupakan sektor utama sehingga penyerapan tenaga kerjapun masih belum maksimal. Tetapi pemerintah telah mencoba untuk menanggulangi masalah tersebut seperti dengan menunjang peningkatan pada sektor wisata, sosial, budaya dan kuliner di Indonesia. Sehingga hal itu diharapkan akan menurunkan jumlah pengangguran agar pertumbuhan ekonomi berada di tempat yang paling baik.

Peningkatan prosentase pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui jumlah Tenaga Kerja, jika terdapat kesalahan maka akan terjadi ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tercipta sehingga akan menimbulkan masalah pengangguran. Pengangguran disini bisa teradi karena jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pencari kerja. Pengangguran yang semakin besar akan menjadi beban

perekonomian daerah sehingga akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi turun dan akan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat dikatakan turun juga disebabkan karena rendahnya penetapan upah minimum suatu daerah. Rendahnya tingkat upah disuatu daerah menyebabkan banyak Tenaga Kerjayang malas untuk mencari pekerjaan, karena mereka menganggap upah/gaji yang didapatkan tidak sebanding dengan kinerja yang mereka lakukan. Di Indonesia, pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerjatentang Upah Minimum. Upah minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada Kebutuhan Fisik Hidup Layak berupa kebutuhan akan pangan. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Dengan adanya penetapan upah tersebut diharapkan dapat memberi pengaruh dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Dalam penetapan upah minimum yang tinggi akan menyerap banyak Tenaga Kerja dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Studi Waisgrais (2003) menemukan bahwa kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan upah yang terjadi pasar Tenaga Kerja. Studi Askenazy (2003) juga menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia. Implikasi upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif.

Tabel 1.6
Jumlah UMK di Jawa Tengah
Tahun 2010-2014

Tahun	UMK
2010	25.793.174
2011	27.452.320
2012	29.324.946
2013	32.052.867
2014	37.430.994

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dari data diatas juga dapat dilihat perkembangan dari penetapan upah minimum di suatu daerah dari tahun 2000-2014. Dari tahun ke tahun penetapan upah minimum selalu bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahun 2010 jumlah upah minimum dari setiap kabupaten/kota sebesar 25.793.174 juta. Di tahun 2011 naik menjadi 27.452.320 juta. Untuk tahun 2012 jumlah upah minimum di Jawa Tengah menjadi 29.324.946 juta. Pada tahun 2013 pun jumlah upah minimum mengalami peningkatan menjadi 32.052.867 juta. Dan ditahun 2014 jumlah upah minimum di Jawa Tengah menjadi 37.430.994 juta. Peningkatan upah minimum ini berdasarkan keadaan perekonomian saat itu, selain itu juga didasarkan atas inflasi dan pandangan ekonomi untuk masa depan, karena upah tersebut digunakan untuk menghidupi kebutuhan pekerja. Dalam menetapkan upah minimum tersebut suatu daerah tidak boleh hanya mengikuti upah-upah di daerah lain, karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan nilai akan uang yang berbeda. Ambil saja contoh di Yogyakarta dan Papua. Di Yogyakarta penetapan upah minimumnya rendah dikarenakan disana harga akan berbagai barang dan kebutuhan hidup relative murah, dibandingkan dengan Papua, disana jauh dari segala bentuk kemewahan, dan sulitnya barang-barang kebutuhan dikirim kesana, jauhnya tempat tersebut dari kemudahan akses memenuhi kebutuhanlah yang membuat segala macam barang dan kebutuhan hidup disana menjadi mahal.

Oleh karena itu dalam uraian pembahasan kali ini akan lebih membahas mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerjadan UMK terhadap Petumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Tahun 2010-2014), agar kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai masalah pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, sehingga kita dapat memberi solusi untuk mengatasi masalah yang ada.

1.2 Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalahnya dengan meneliti Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerjadan UMK terhadap Perumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Tahun 2010-2014). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerjadan UMK sebagai variabel independen. Perumbuhan Ekonomi merupakan variabel dependen. Dengan jumlah 35 observasi dari tahun 2010 hingga 2014

1.3 Rumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur untuk melihat apakah suatu Negara atau daerah tersebut dikatakan berhasil dalam membangun pertumbuhan ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan daerah lain masih cukup rendah. Dari uraian diatas maka akan terbentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Perumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Perumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah?

3. Bagaimana pengaruh Daya Tarik Wisata terhadap Perumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap Perumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh UMK terhadap Perumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerjadan UMK merupakan salah satu factor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan begitu secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
- 2) Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
- 3) Menganalisis pengaruh Daya Tarik Wisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
- 4) Menganalisis pengaruh Tenaga Kerjaterhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
- 5) Menganalisis pengaruh UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam memahami dan mendalami masalah dibidang ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan Jumlah

- Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerjadan UMK yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Sebagai sumber informasi bagi pengambilan kebijakan pemerintah Jawa Tengah khususnya dalam hal Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerjadan UMK disuatu daerah.
 - 3) Sebagai bahan kajian dan literature dalam mengatasi masalah tentang Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerjadan UMK dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - 4) Sebagai sumber informasi dan datan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulisan dibagi menjadi lima bab untuk mempermudah penelitian dan pemahaman dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, tema penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan mamfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai pengkajian hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya pada topik yang sama. Selain itu juga berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerjadan UMK dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga berisi tentang factor-faktor lain yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi, kendala dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, sumber data yang sesuai dalam penelitian, serta metode pengumpulan data.

BAB IV : HASIL, ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil deskripsi dari objek penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerjadan UMK terhadap Perumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Tahun 2010-2014)”, serata mengetahui apakah variabel tersebut merupakan factor penentu pertumbuhan ekonomi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V mengemukakan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan, beserta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.